DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi, Rianto. 2004. *Metode Sosial dan Hukum.* Jakarta: Sinar Granit.

Afif, Wahab. 1994, *Fiqh mawaris.* Serang: Yayasan Ulumul Quran, cet-I.

Amiruddin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo.

Ali, Affandi, 1997, *Hukum Waris Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ahlan, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Alting, Husen. 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah,* Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Elmiyah, Nurul dan Surini Ahlan. 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hadikusuma, Hilman. 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bhakti Bandung.

Idris Ramulyo, M, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Perangin, Effendi. 2010, *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pitlo, A. 1979, *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*. Terjemahan Isa Arif. Jakarta: Intermasa.

Pitlo, 1995, *Hukum Waris Buku Kesatu,* diterjemahkan oleh F. Tengker, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti.

Perangin, Effendi. 2010, *Hukum Waris*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Prodjodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia*, Cetakan II, Bandung: Sumur Bandung.

Salim, Oemar, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakata: Rineka Cipta.

Santoso Pudjosubroto, R. 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sing.

Setiady, Tolib, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Sofyan, Syahril, 2011, *Bebearapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Medan : Pustaka Bangsa Press.

Sri Wiyarti, Mg, 2000, *Hukum Adat dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bagian B, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Sudiyat, Imam, 1990, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Jakarta: Liberty.

Soekanto, Soerjono.1988, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerdjono. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Triwulan Tutik, Titik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.

Usman, Suparman. 1990. *Ikhtisar hukum waris menurut KUH perdata B.W*. Jakarta : Darul ulum press.

Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Wicaksono, Satrio, 2011, *Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Transmedia Pustaka.

Wignyodipoero, Soerojo, 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Haji Masagung.

Wibesite/Skripsi

Kedudukan anak angkat dalam sistem hukum nasional. http://andianas. blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html. Diunduh pada hari Kamis, 14 Agustus 2016. Pukul 09.17.

Pengertian anak angkat dan pengangkatan anak. http://www.academia.edu/11802767/Makalah_Kedudukan_Anak_Angkat_Dalam_Sistem_Hukum_Nasional. Diunduh pada hari Kamis, 14 Agustus 2016. Pukul 10.18.

Pengertian anak tiri menurut hukum adat. http://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=146241. Diunduh pada hari Kamis, 14 Agustus 2016. Pukul 10.18.

Kedudukan Anak Angkat dalam Sistem Hukum Nasional. http://andianas.blogspot.co.id/2012/03/hukum-keluarga-status-anak-dan-akibat.html. Diunduh pada hari Kamis, 14 Agustus 2016. Pukul 09.17.

Ulul Arham, 2012, "Studi Komparasi Terhadap Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:, *Skripsi* tidak diterbitkan, Surabaya: FH UPN "Veteran".

Aturan Perndang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Wetboek Burgelijk), diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)